

RENJA2025

**RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring, Palembang
Telp/Fax: 0711-518757

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan	5
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	10
2.3. Identifikasi Isu-isu Strategis.....	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD	22
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	23
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	23
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	24
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	25
BAB V. PENUTUP	26



KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Renja merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja juga merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan (keluaran) yang sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Dokumen ini menjadi suatu acuan untuk pelaksanaan pembangunan agar program dan kegiatan yang dijalankan lebih terencana, terinci dan terstruktur. Efektifitas dan efisiensi merupakan hal yang sangat terkait dengan pelaksanaan pembangunan untuk menindaklanjuti rencana kerja yang telah disusun.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan ini juga merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi dari semua bidang yang ada. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 diharapkan bisa memberikan pondasi yang kuat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang. Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terencana dengan baik tentunya akan memberikan keluaran dan hasil yang baik demi terwujudnya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan.

Kami sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 ini, sehingga kami sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun agar rencana kerja ini dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana yang diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Aries Irwan Wahyu, S.STPi., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19681120 198903 1 006



BAB I. PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat penting dan strategis untuk menjadi tumpuan dalam mewujudkan tiga pilar pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikuatkan dengan ditetapkannya Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi andalan untuk peningkatan produksi perikanan dalam rangka penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sesuai dengan Visi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, yaitu **SUMSEL MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA** Dinas Kelautan dan Perikanan pada Misi Ke 1 yaitu Membangun Sumsel berbasis **ekonomi kerakyatan**, yang didukung sektor **pertanian, industri dan UMKM** yang tangguh untuk mengatasi **penggangguran dan kemiskinan** baik diperkotaan maupun di perdesaan, dan berada pada sasaran 3 yaitu **Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan**, ini sesuai dengan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Paradigma pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang lebih diarahkan kepada paradigma baru, yaitu pembangunan perikanan yang difokuskan pada kegiatan : (1) budidaya perikanan, (2) rasionalisasi perikanan tangkap (kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum yang diarahkan pada penggunaan alat tangkap yang tidak membahayakan lingkungan perairan dan kelestarian sumberdaya perikanan, serta peningkatan mutu hasil tangkapan), (3) peningkatan mutu hasil dan nilai tambah produk hasil perikanan dan (4) pemeliharaan dan peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan. Untuk mewujudkan paradigma pembangunan sektor kelautan perikanan tersebut, maka diperlukan perencanaan strategis yang tepat. Hal ini dibutuhkan karena perencanaan strategi merupakan suatu pedoman bagi institusi dalam penyusunan program-program kerjanya.

Arah kebijakan dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya diharapkan juga memberikan pengaruh positif terhadap dunia usaha kelautan dan perikanan, seperti halnya pada tahun 2025 ini Provinsi Sumatera Selatan menentukan Fokus Pembangunan Daerah yang berkonsentrasi pada 4 (empat) unsur pokok yakni :

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur , Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata

3. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragam

Untuk mewujudkan hal yang telah disebutkan diatas maka perlu mensinergikan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan sehingga Keselarasan program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota akan tercipta.

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja juga merupakan penjabaran Rensta OPD yang mengacu pada RKPD Daerah. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Sementara itu, baik Renja OPD ataupun RKPD menginduk pada Renstra OPD dan RPJMD yang keduanya mempunyai keterkaitan dengan Renstra KL dan RPJMN. Atas dasar inilah Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan tentu harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang membidangi kelautan dan perikanan, oleh karena itu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan juga Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk mensinergikan kegiatan APBD dan APBN yang ada disemua bidang sektor perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar yang menjadi landasan penyusunan Renja OPD ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
9. Perda No. 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan;
10. Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renja Kelautan dan Perikanan ini, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

- I. Renja OPD dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan Kumpulan dari usulan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan melalui Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan juga Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.
- II. Renja disusun agar dapat menjadi media pelaksanaan apa yang menjadi target dan tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 – 2026, yang mana tahun 2025 merupakan periode kedua Renstra sehingga diharapkan target yang ditetapkan dapat menjadi titik tolak pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun mendatang.
- III. Renja OPD ini juga merupakan representasi dari arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan dari semua bidang yang ada sesuai tupoksinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renja ini mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Sistematika Penyajian Rancangan Renja OPD tahun 2023 dengan format sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU



- 2.1 Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2.2 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2022
- 2.3 Identifikasi Isu-isu Strategis
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Kondisi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 48 menyatakan bahwa Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi-fungsi yang diberikan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 49 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.
- b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
- h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi.
- l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
- m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan pada Bab III Pasal 3 adalah sebagai berikut :



- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan
 3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Produksi Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi Budidaya
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya
 3. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya
- e. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan dan Pulau-Pulau Kecil
 3. Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 3 (dua) UPTD, yaitu :
 1. Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 8 dan pasal 9 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - Tugas Pokok adalah untuk merencanakan, melaksanakan, membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan laut.
 - Fungsi :
 - Penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
 - Penyediaan benih dan calon induk yang bermutu;
 - Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan laut;
 - Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah dan kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik dan toksin;

- Pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan laut;
 - Penyampaian laporan kegiatan UPTD;
 - Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksanaan serta Fungsional;
 - Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 12 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas Pokok adalah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam hal pengujian dan penerapan, bimbingan diversifikasi produk perikanan, sertifikasi produk serta penerapan mutu hasil perikanan.
 2. Fungsi :
 - Pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu, keamanan pangan pangan hasil kelautan dan perikanan serta lembaga sertifikasi produk hasil perikanan;
 - Pelaksanaan bimbingan pemenuhan persyaratan SNI;
 - Pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - Pelaksanaan monitoring hasil perikanan;
 - Pengawasan dan pembinaan terkait kepegawaian, ketatausahaan, perencanaan anggaran, keuangan, pengolahan data dan penerbitan sertifikasi;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan bidang, instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan penerapan mutu;
 - Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana Fungsional;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 3. Pelabuhan Perikanan Sungsang
 - Tugas Pokok adalah untuk melaksanakan, mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan sungsang.
 - Fungsi :
 - Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - Pelaksanaan pemeriksaan bukti pencatatan (log book);
 - Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;

- Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan;
 - Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar ;
 - Pelaksanaan pepembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
 - Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha;
 - Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (CPIB);
 - Pelaksanaan inspeksi pembokaran ikan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
 - Pembagian tugas kepada kepala Subbagian dan Pelaksana serta Fungsional;
 - Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Bab VI pasal 23 mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Aset-aset yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan meliputi aset tanah dan bangunan, aset kendaraan dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2.1. Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (sampai dengan April 2025)

NO	JENIS	JUMLAH
1	SDM PNS (Berdasarkan Golongan)	
	a. Golongan IV	19
	b. Golongan III	66
	c. Golongan II	4
	d. Golongan I	1
	e. Golongan IX	13
	f. Golongan VII	5
	Total	108



NO	JENIS	JUMLAH
2	Honorer	
	a. Honorer APBD	9
	b. Honorer TKS	18
	Total	27
3	SDM PNS (Berdasarkan Jabatan)	
	a. Pejabat Struktural	31
	b. Pejabat Fungsional Tertentu	
	- Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan	17
	- Fungsional Analis Aquaculture	2
	- Fungsional Teknisi Aquaculture	1
	- Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	2
	- Fungsional Pengawas Perikanan	13
	- Arsiparis	4
	c. Pejabat Fungsional Umum	18
	Total	108
4	SDM PNS (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	
	a. Doktoral / S3	
	b. Magister / S2	30
	c. Sarjana / S1	56
	d. Diploma 4 / D4	7
	e. Diploma 3 / D3	8
	f. Diploma 2 / D2	
	g. Diploma / D1	
	h. Sekolah Menengah Atas / SMA	8
	i. Sekolah Menengah Pertama / SMP	
	j. Sekolah Dasar / SD	2

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Pada Tahun 2024, 31 (tiga puluh satu) Jabatan Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel semuanya terisi.
2. Pada tahun 2024, PNS yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 36 orang yang terbagi atas fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan berjumlah 18 orang, Fungsional Analis Aquaculture berjumlah 2 orang, Fungsional Teknisi Aquaculture berjumlah 1 orang, Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap berjumlah 2 orang, Fungsional Pengawas Perikanan berjumlah 12 orang dan Fungsional Arsiparis berjumlah 4 orang



Tabel 2.1.2.2. Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

NO.	JENIS ASSET	LOKASI	LUAS (M2)		PEMANFAATAN SEKARANG	KET.
			TANAH	BANGUNAN		
1.	Bangunan Gedung Kantor	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring		216	Kantor	Terdaftar
2.	Rumah dinas	Jl. Veteran, Gg. Permata Merak RT 23 No. 68, Kel. Kuto Batu, Palembang	1.225	209	Rumah dinas	Terdaftar
3.	Kantor UPTD LPPMHP	Jl. Taman Sari KM 6, Palembang	-	622	Gedung Kantor UPTD LPPMHP	Terdaftar
4.	Rumah dinas Kepala UPTD LPPMHP	Jl. Taman Sari KM 6, Palembang	-	356	Gudang/perpustakaan	Terdaftar
5.	Kolam Tawar Air	Di Indralaya Kab. Ogan Ilir	92.005	-	Tanah Kolam	Terdaftar
6.	Kolam Tawar Air	Di Pampangan Kab. Ogan Komering Ilir	400	-	Tanah Kolam	Terdaftar
7.	Kolam Tawar Air	Di Pagar Alam Kab. Pagar Alam	6.877	-	Tanah Kolam	Terdaftar
8.	Kolam Tawar Air	Di Pengadonan Kab.OKU	6.401	-	Tanah Kolam	Terdaftar
9.	Kolam Tawar Air	Di Belitang Kab. OKUT	3.454	-	Tanah Kolam	Terdaftar
10.	Kolam air tawar	Di Muara Beliti Kab. MURA	65.322	-	Tanah Kolam	Terdaftar
11.	Kolam air tawar	Di Tugumulyo Kab MURA	6.044	-	Tanah Kolam	Terdaftar
12.	Tanah Bangunan Gedung	Di Kab Lubuk Linggau	60.447		Bangunan Kantor	Terdaftar

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Di Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumsel melaksanakan 6 (enam) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan APBD dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 40.339.887.980** (termasuk APBD perubahan), dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai = Rp. 15.546.285.000
- Belanja Barang dan Jasa = Rp. 19.289.334.980
- Belanja Modal = Rp. 5.504.268.000

Realisasi APBD sebesar **Rp 38.313.085.791** atau 94,98 % dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar **Rp. 14.439.216.455** (92,87 %) realisasi belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 18.415.840.867** (95,47 %) dan realisasi belanja modal sebesar **Rp 5.458.028.469** (5,89 %). Rincian program dan kegiatan APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel II.1.1 Evaluasi Program Penunjang Urusan Pemerintah

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		TARGET
		(%)	(Rp)	(%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	968.200.000	97,05	939.613.685	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	751.200.000	96,45	724.526.814	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000	99,16	16.857.500	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	99,11	198.229.371	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.237.110.000	92,92	16.945.097.955	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.324.655.000	93,44	14.318.646.455	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.895.455.000	90,13	2.609.624.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.000.000	98,99	16.827.500	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	99,83	99.830.400	100,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	99,83	99.830.400	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	530.500.000	69,13	366.721.472	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	292.500.000	98,44	287.950.000	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	238.000.000	33,10	78.771.472	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.461.532.980	98,39	2.421.800.871	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	99,77	99.773.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	620.000.000	99,35	615.959.495	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	291.532.980	97,48	284.185.500	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	99,25	248.133.000	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	99,58	199.156.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	97,46	974.593.876	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	415.400.000	100,00	415.400.000	100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.400.000	100,00	415.400.000	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.309.620	88,58	979.120.010	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	827.309.620	85,98	711.280.010	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.000.000	96,35	267.840.000	100,00



KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		TARGET
		(%)	(Rp)	(%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.440.400.000	98,25	1.415.258.337	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	99,17	347.091.263	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	590.400.000	97,13	573.472.250	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	98,00	98.000.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	99,17	396.694.824	100,00

Berdasarkan evaluasi bulanan, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan **Rp 25.258.452.600** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp 23.582.842.730 (93,37 %)** dan realisasi fisik sebesar **100.00 %**.

A. PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, merupakan kegiatan yang terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu a.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, b.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, c.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 968.200.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 939.613.685 (97,05 %) dan realisasi fisik sebesar 100.00%. Kegiatan ini memiliki output berupa dokumen renja, dokumen lakip dan jumlah data pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan kabupaten / kota.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan dengan tiga sub kegiatan yaitu a.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, b.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, c.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.237.110.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.945.097.955 (92,92%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN, jumlah tenaga untuk kegiatan administrasi keuangan dan jumlah dokumen laporan tahunan.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang memiliki satu sub kegiatan yaitu Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.830.400 (99,83 %) serta realisasi fisik sebesar 100 %. Output dari kegiatan



ini adalah terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang memiliki sub kegiatan yaitu a.) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, b.) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 530.500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp 366.721.472 (69,13 %) serta realisasi fisik sebesar 100 %. Output dari kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas dan SDM yang mengikuti pendidikan dan keterampilan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang memiliki tujuh sub kegiatan yaitu a.) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, b.) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, c.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, d.) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, e.) Fasilitas Kunjungan Tamu, f.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.461.532.980 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.421.800.871 (98,39 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Hasil dari kegiatan ini diantaranya tersedianya komponen listrik kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya publikasi dan dokumentasi, rapat yang terlaksana dengan baik serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang memiliki satu sub kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang memiliki anggaran Rp. 415.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 415.400.000 (100 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan kegiatan yang memiliki dua sub kegiatan yaitu a.) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, b.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan jumlah anggaran Rp. 1.105.309.620 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 979.120.010 (88,58 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Hasil dari kegiatan ini diantaranya tersedianya layanan komunikasi, air dan listrik serta tenaga jasa kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan kegiatan dengan sub kegiatan a.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, b.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, c.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, d.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.440.400.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.415.258.337 (98,25 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, serta unit gedung dan peralatan kantor yang berkualitas.

Tabel II.1.2 Evaluasi Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		Target
		(%)	(Rp)	(%)
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	750.000.000	89,59	671.960.674	100,00
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	400.000.000	85,41	341.624.074	100,00
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	350.000.000	94,38	330.336.600	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.000.000	98,52	98.517.700	100,00
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	100.000.000	98,52	98.517.700	100,00

Berdasarkan evaluasi bulanan, pada Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil adalah sebagai berikut :

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil **Rp. 850.000.000** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 770.478.374 (90,64 %)** dan realisasi fisik sebesar **100 %**.

PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan yang memiliki dua sub kegiatan a.) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat, b.) Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 671.960.674 (89,59 %) dan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen usulan penyesuaian alokasi ruang perda RZWP3K dan rehabilitasi wilayah pesisir
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan kegiatan yang memiliki sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memiliki anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 98.517.700 (98,52 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun output dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat pesisir yang telah diberikan pelatihan/sosialisasi



Tabel II.1.3 Evaluasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI		Target
		(%)	(Rp)	(%)
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	650.000.000	99,62	647.515.698	100,00
Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	550.000.000	99,57	547.641.199	100,00
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	100.000.000	99,87	99.874.499	100,00
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.350.000.000	95,42	1.288.165.715	100,00
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.350.000.000	95,42	1.288.165.715	100,00
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	150.000.000	94,25	141.375.999	100,00
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	150.000.000	94,25	141.375.999	100,00
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.923.120.000	99,27	2.901.767.495	100,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.400.768.000	99,60	2.391.200.000	100,00
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	522.352.000	97,74	510.567.495	100,00

Berdasarkan evaluasi bulanan, pada Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagai berikut:

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap **Rp. 5.073.120.000** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.978.824.907 (98,14 %)** dan realisasi fisik sebesar 100,00 %.

PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil merupakan kegiatan yang memiliki dua sub kegiatan yaitu a.) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, b.) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 647.515.698 (99,62 %) dan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya program bantuan alat tangkap yang ramah



- lingkungan kepada nelayan peariran laut dan pendataan statistik perikanan tangkap.
- 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi merupakan kegiatan yang memiliki sub kegiatan yaitu Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap memiliki anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 141.375.999 (94,25 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya program bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada nelayan perairan darat.
- 3) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi merupakan kegiatan yang memiliki dua sub kegiatan yaitu a.) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan, b.) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.923.120.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.901.767.495 (99,27 %) dan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan serta dokumen pelayanan di Pelabuhan Perikanan yang tersedia dengan baik.

Tabel II.1.4. Evaluasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI		TARGET
		(%)	(Rp)	(%)
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100.000.000	99,59	99.590.000	100,00
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	100.000.000	99,59	99.590.000	100,00
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	300.000.000	99,66	298.970.000	100,00
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	300.000.000	99,66	298.970.000	100,00
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	5.228.005.380	99,11	5.181.237.197	100,00
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.813.600.000	99,06	1.796.628.750	100,00



PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI		TARGET
		(%)	(Rp)	(%)
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.414.405.380	99,13	3.384.608.447	100,00

Berdasarkan Evaluasi bulanan, pada program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai berikut :

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya **Rp. 5.628.005.380** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.579.797.197 (99,14 %)** dan realisasi fisik sebesar **100 %**.

PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi merupakan kegiatan yang memiliki sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang memiliki anggaran sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.590.000 dan realiasasi fisik sebesar 100 %. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan statistik pada perikanan budidaya;
- 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut merupakan kegiatan yang memiliki sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 298.970.000 (99,66 %) dan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan operasional pada UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat merupakan kegiatan yang memiliki sub kegiatan a.) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, b.) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 5.228.005.380 dengan realisasi sebesar Rp. 5.181.237.197 (99,11 %) dan realiasasi fisik 100 %. Adapun output dari kegiatan ini adalah bantuan sarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR), pengembangan perikanan air tawar dan pengembangan budidaya ikan untuk masyarakat miskin.



Tabel II.1.5. Evaluasi Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI		TARGET (%)
		(%)	(Rp)	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	900.000.000	99,32	893.905.420	100,00
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	490.000.000	98,76	483.905.420	100,00

Berdasarkan evaluasi bulanan, pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan **Rp. 900.000.000** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 893.905.420 (99,32 %)** dan realisasi fisik sebesar **100 %**.

PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil merupakan kegiatan yang memiliki sub kegiatan yaitu a.) Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), b.) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 893.905.420 (99,32 %) dan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan atau koordinasi antar aparat penegak hukum dan operasional pengawasan, tersedianya sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kelompok yang dibina dan dievaluasi.



Tabel II.1.6. Evaluasi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI		TARGE T (%)
		(%)	(Rp)	
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.549.100.000	94,53	1.464.373.300	100,00
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	857.300.000	97,01	831.624.293	100,00
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	691.800.000	91,46	632.749.007	100,00
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.081.210.000	96,45	1.042.863.863	100,00
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	533.710.000	93,96	501.478.920	100,00
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	547.500.000	98,88	541.384.943	100,00

Berdasarkan evaluasi bulanan, pada program pengembangan perikanan tangkap sebagai berikut :

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan **Rp. 2.630.310.000** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.507.237.163 (95,32%)** dan realisasi fisik sebesar **100.00 %**.

PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar merupakan kegiatan yang memiliki dua sub kegiatan yaitu a.) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, b.) Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing dengan anggaran sebesar Rp.



1.549.100.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.373.300 (94,53 %) dan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun output dari kegiatan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana laboratorium serta pengembangan pengolahan hasil perikanan dan keamanan pangan produk perikanan.

- 2) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi merupakan kegiatan yang memiliki dua sub kegiatan yaitu a.) Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, b.) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 1.081.210.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.042.863.863 (96,45 %) dan realiasi fisik sebesar 100%. Adapun output dari kegiatan ini adalah rekomendasi perizinan usaha pengolahan perikanan dan data informasi pengolahan perikanan.

2.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki permasalahan dan tantangan. Dengan analisa *Strength, Weakness, Opportunity and Thread* (SWOT) dari RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan, diperoleh kelemahan-kelemahan yang dianggap dapat menurunkan kinerja pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, Provinsi Sumatera Selatan. Kelemahan-kelemahan tersebut, diantaranya adalah :

- a) Tingkat pendidikan formal pelaku usaha perikanan pada umumnya masih rendah.
- b) Adanya kelompok-kelompok masyarakat atau LSM yang sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan negatif yang bertujuan untuk mengganggu kinerja dan stabilitas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel.
- c) Mahalnya harga pakan pabrikan, karena tidak adanya subsidi pakan dari pemerintah.
- d) Lebih mahalnya harga BBM di sentra-sentra nelayan, karena Pertamina tidak mau menanggung harga pengiriman BBM.
- e) Semakin berkurangnya sumber daya ikan (SDI) di laut yang bisa dimanfaatkan.
- f) Adanya perubahan musim dan cuaca global yang bisa mengancam ekosistem dan populasi ikan.
- g) Akan masuknya produk-produk kelautan dan perikanan dari berbagai negara melalui mekanisme pasar bebas, sehingga mengancam produk dalam negeri.

Kelemahan yang dimiliki oleh sektor kelautan dan perikanan Sumatera Selatan tersebut diharapkan dapat segera teratasi melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional yang berkeadilan sehingga diharapkan mampu mengurangi bahkan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Selain hal tersebut, percepatan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah pusat atau daerah terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan serta masyarakat



yang ditunjang dengan adanya dukungan anggaran baik dari APBN dan APBD, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pencapaian sasaran sektor kelautan dan perikanan dapat terwujud.

Pembangunan kelautan dan perikanan tentunya mempunyai beberapa ancaman yang mampu menghambat proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Ancaman yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) **Otonomi daerah**; menimbulkan egoisme kedaerahan yang dikhawatirkan mengganggu harmonisasi kerja sama antar daerah
- b) **Eksplorasi sumber daya perikanan** yang cenderung berlebihan dan merusak.

Upaya untuk terus berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota lingkup kelautan dan perikanan dirasakan sangatlah diperlukan, karena pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembangunan. Koordinasi juga merupakan cara di mana antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota saling mendukung satu sama lain untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan kepala daerah masing-masing, sehingga bersama-sama mencapai sasaran yang ditetapkan secara lebih luas.

Hasil suatu proses pembangunan akan didapatkan secara maksimal apabila antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan kemampuannya secara optimal untuk keberhasilan bersama. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang cenderung berlebihan dan merusak tentunya mampu diatasi dengan pemberian penyuluhan tentang manfaat lingkungan yang berkesinambungan kepada aparat, pelaku usaha dan masyarakat secara bersama-sama. Dengan bertambahnya kuantitas masyarakat secara umum yang mengetahui arti penting suatu lingkungan, maka diharapkan kemampuan dan kesadaran masyarakat umum untuk menjaga lingkungan perairan di sekitarnya akan meningkat juga. Pada umumnya masyarakat akan lebih menghargai arti pentingnya lingkungan jika hal tersebut memberikan manfaat.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Budaya dan kebiasaan masyarakat Sumsel yang gemar mengkonsumsi ikan.
- 2) Besarnya potensi perairan umum di Sumsel.
- 3) Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kota Palembang.
- 4) Kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sejalan.
- 5) Dipilihnya Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Pengembangan Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) se-Asia Tenggara yang ditandai dengan pembangunan kantor *SEAFDEC (South East Asian Fisheries Development Center)*.



- 6) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kinerja dan Proyeksi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya perwujudan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, menyebutkan bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi

Rancangan awal Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan akan di fokuskan untuk membiayai program dan kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Penetapan Kebijakan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta ruang laut dan ruang perairan umum daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan PUD dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil, pengelolaan kawasan konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD;
- b. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta ruang laut dan ruang perairan umum daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil, pengelolaan kawasan konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP dibidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usaha nya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD.



- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, pelayanan izin, dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta ruang laut dan ruang perairan umum daratan diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan PUD, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir, PUD dan pulau-pulau kecil, pengelolaan kawasan konservasi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 5 GT sampai dengan 30 GT, pelayanan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan pelayanan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, pengembangan usaha, pemasaran, mutu dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan UPTD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Secara hirarki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD dibawah naungan Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus memperhatikan kebijakan dari Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia itu sendiri yang berlaku secara nasional. Kebijakan – kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2. Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan.
3. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita.
4. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
5. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah penerbitan sertifikasi produk hasil perikanan.
7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Kawasan Korsevasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
8. Meningkatnya pengawasan luas wilayah perairan Indonesia oleh aparaturngawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah orang yang dibina dalam rangka penurunan ilegal fishing (orang)

Kebijakan diatas tentunya diselaraskan dengan isu pembangunan yang ada di Sumatera Selatan yang tentunya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, beberapa hal yang menjadi sasaran pembangunan di sumatera selatan diantaranya tertuang dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Rendahnya pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar);
2. Rendahnya produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
3. Rendahnya harga jual komoditas ikan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perairan umum;
5. Menurunnya sumber daya ikan di laut dan perairan umum akibat tekanan penangkapan, *illegal fishing*;
6. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan modal produksi para pelaku usaha.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki secara optimal dan bertanggung jawab;
2. Meningkatkan dan memanfaatkan jaringan pasar komoditas kelautan dan perikanan di dalam maupun luar negeri; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perairan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya ikan.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan, maka telah dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan potensi perairan umum dan laut secara optimal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan promosi dan kerja sama untuk meningkatkan jaringan pemasaran dan investasi kelautan dan perikanan di dalam maupun luar negeri;
3. Memberdayakan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pemberian pelatihan, percontohan dan bantuan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan perairan dengan merehabilitasi dan menjaga lingkungan perairan bersama aparat penegak hukum dan masyarakat; dan
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan infrastruktur kelautan dan perikanan.

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah kebijakan-kebijakan seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, diantaranya adalah : Peningkatan Produksi Perikanan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan serta Fokus Pembangunan 2025 daerah yang berkonsentrasi pada 4 (empat) unsur pokok yakni :

1. *Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia*
2. *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur , Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata*
3. *Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana*
4. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragam*

Dari hal – hal diatas yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan oleh bidang dan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun bidang dan UPTD pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mencakup 4 (empat) bidang teknis dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu:

- 1) Bidang Perikanan Tangkap
- 2) Bidang Perikanan Budidaya
- 3) Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- 4) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 5) UPTD Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut
- 6) UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), dan
- 7) UPTD Pelabuhan Perikanan Sungsang

Bidang teknis dan UPTD tersebut bekerja untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pembuat kebijakan dalam hal pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Program Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang telah dibayar gaji dan tunjangan ASN
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
a	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor



No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi
a	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K
b	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Direhabilitasi
II	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
a	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya



3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
a	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
II	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
a	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat
b	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat
III	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
a	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil
IV	Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
A	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia
b	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana



4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
a	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan
b	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko
II	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
a	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
b	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia
III	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
a	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
b	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil
a	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya
b	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif
II	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota



NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
a	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi
b	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi
c	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi

6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
I	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
a	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar
b	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
II	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
a	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar



NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
III	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
a	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi



BAB V. PENUTUP

Kami berharap bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang kami susun ini dapat menjadi acuan dan tolak ukur pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja OPD] tahun anggaran 2024 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis [Renstra OPD] tahun keempat, mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah [RPD] 2024 – 2026.
- c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.